

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif

Pada Rapat Kerja Umum (Golkar) didirikan pada tahun 1964 dengan berdirinya Daerah Golkar menjelang akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekretariat Golkar dikerahkan oleh militer, khususnya aparat angkatan bersenjata (seperti Letkol Suhardiman dari Saksi) untuk mengumpulkan banyak asosiasi pemuda, peneliti, wanita, buruh peternakan, dan pemancing dalam satu sekretariat bersama kelompok kerja.

Sekretariat bersama Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekretariat ini lahir karena berkembangnya pemberontakan PKI dan perkumpulan-perkumpulan massanya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar front publik. Sekretariat Golkar adalah tempat diskusi untuk pertemuan praktis/serikat kerja murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Pimpinan utama Sekretariat Golkar adalah Brigjen Djuhartono.

Pada awalnya individu berjumlah 61 asosiasi dan kemudian berkembang menjadi 291 asosiasi. Jumlah ini berkembang pesat, mengingat pertemuan-pertemuan praktis lainnya yang merupakan individu-individu dari sekretariat Golkar di depan publik memahami bahwa perjuangan perkumpulan ini adalah mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.), itu adalah :

1. KOSGORO (Gotong Royong Serbaguna Bermanfaat)
2. SOKSI (Asosiasi Pekerja Fokus)
3. MKGR (Wawancara Keluarga Gotong Royong)
4. Asosiasi yang Mahir
5. HANKAM (Asosiasi Perlindungan dan Keamanan)
6. GAKARI (Pengembangan Karya Insan Indonesia)
7. Kemajuan Pembangunan

Untuk menghadapi persaingan politik tahun 1971, KINO memberikan pilihan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk mengambil bagian dalam keputusan politik melalui satu nama dan satu citra, khususnya Golkar. Logo dan nama ini telah dipegang sampai sekarang. Golkar muncul sebagai juara dengan perolehan

suara atau 62,79% suara lengkap. Kuantitas suara yang diperoleh cukup merata di seluruh daerah.

Ketetapan MPRS menyatakan perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia. Adanya pedoman tersebut membuat sekretaris Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan bahwa itu hanyalah sebuah kelompok ideologis karena ungkapan ini mengandung arti penting dan perlunya isu-isu pemerintahan terhadap penolakan perbaikan.

Golkar menggelar Musyawarah Rakyat (MUNAS) 1 di Surabaya pada September 1973. Myajen Amir Murtono juga terpilih sebagai direktur Golkar. Persatuan Golkar mulai berjalan selama ini dengan diselenggarakannya perkumpulan-perkumpulan pakar seperti Hubungan Pemancing Seluruh Indonesia (HSNI), Hubungan Buruh Indonesia (HKTI), dan Organisasi Spesialis Seluruh Indonesia (FBSI).

Sedangkan di kabupaten serang, Golkar berdiri setelah adanya perpecahan diberbagai daerah, pada waktu itu ketua Golkar Kabupaten Serang adalah Supardi, ketua umum pertama DPD Golkar kabupaten serang pada tahun 1964-1968, kemudian

disusul pada tahun 1968-1973 digantikan oleh HRD. Gunasah, ketua umum kedua DPD Golkar kabupaten serang, pada tahun 1973-1978 Ali Jaya ketua umum ketiga DPD Golkar Kabupaten Serang, pada tahun 1978-1983 H. Tb. Suwandi ketua umum keempat DPD Golkar Kabupaten Serang, pada tahun 1983-1988 H. Tb. Saparudin Ketua Umum kelima DPD Golkar Kabupaten Serang, pada tahun 1988-1993 H. Pardjono.BA Ketua Umum Keenam DPD Golkar Kabupaten Serang, pada tahun 1993-1998 H. Nana Kuryana Ketua Umum ketujuh DPD Golkar Kabupaten Serang, pada tahun 1998-2004 h. tb Edi Mulyadi ketua umum kedelapan DPD Golkar Kabupaten Serang, pada tahun 2004-2006 H. bunyamin ketua umum kesembilan DPD Golkar Kabupaten Serang, pada tahun 2006-2009 SM. Hartono, SE ketua umum kesepuluh DPD Golkar Kabupaten Serang, pada tahun 2009-2015 H. SM. Hartono SE kembali memimpin DPD Golkar Kabupaten Serang, pada tahun 2016 H. Bahrul Ulum, S.Ag sebagai PLT Golkar Kabupaten Serang. kemudian pada tahun 2016-2019 H. Fahmi Hakim. SE sebagai ketua umum kedua belas DPD Golkar

Kabupaten Serang dan hingga sampai sekarang H. Fahmi Hakim
Memimpin sebagai DPD Golkar Kabupaten Serang.¹

B. Asas, Sifat, Dan Prinsip Perjuangan Golkar

Dalam Klarifikasi Bagian II Pembinaan/Pengerjaan
Golkar Tentang Standar, Kualitas, dan Standar Perjuangan
Golkar, khususnya:

Pasal 1

Golkar bergantung pada Pancasila dan UUD 1945

Pasal 2

Golkar Bersifat Nasionalis dan Bhineka Tunggal Ika

Pasal 3

Prinsip Perjuangan Golkar Adalah :

- a) Aturan Pertempuran
- b) Standar Patriot
- c) Standar Kebenaran, Keterpercayaan, dan Kesetaraan
- d) Aturan Pertimbangan

¹ Sabihis, S.Ag, MH (*Wakil Ketua bidang Hukum Dan Ham DPD Kab. Serang*), Diwawancarai Oleh Penulis, *Recording*, Dikantornya 30 Januari 2020, Pukul 16.00 WIB.

e) Standar Korespondensi, Harmoni, dan Solidaritas,

f) Standar berbasis suara.²

C. Visi Misi DPD Golkar Kabupaten Serang

Secara aturan, penalaran Visi dan Misi DPD Rezim

Golkar Serang ini setara dengan Visi dan Misi (DPP) Pengurus

Pusat Golkar.

1. Visi Golkar

Pengakuan terhadap budaya Indonesia yang bersatu padu, berdaulat, tingkat tinggi, kekinian, tenteram, adil, makmur, berkeyakinan dan bermartabat, mengetahui hukum dan iklim, menguasai ilmu pengetahuan dan inovasi serta bernilai dalam pergaulan dunia.

2. Misi Golkar

- a. Memelihara, mengamankan, dan melindungi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara untuk membentengi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memahami kaidah-kaidah deklarasi melalui pelaksanaan perbaikan umum di segala bidang untuk memahami

²Ketetapan Munaslub VI Partai Golongan Karya 2016.

masyarakat yang berdasarkan suara dan berdaulat, makmur dan sejahtera, memelihara hukum dan ketertiban dan tentang kebebasan bersama, serta pengakuan permintaan harmoni dunia.

- c. Memahami pemerintahan yang kuat dengan administrasi aturan yang besar, bersih, sah, dan mayoritas.

D. Struktur Organisasi Partai Golongan Karya

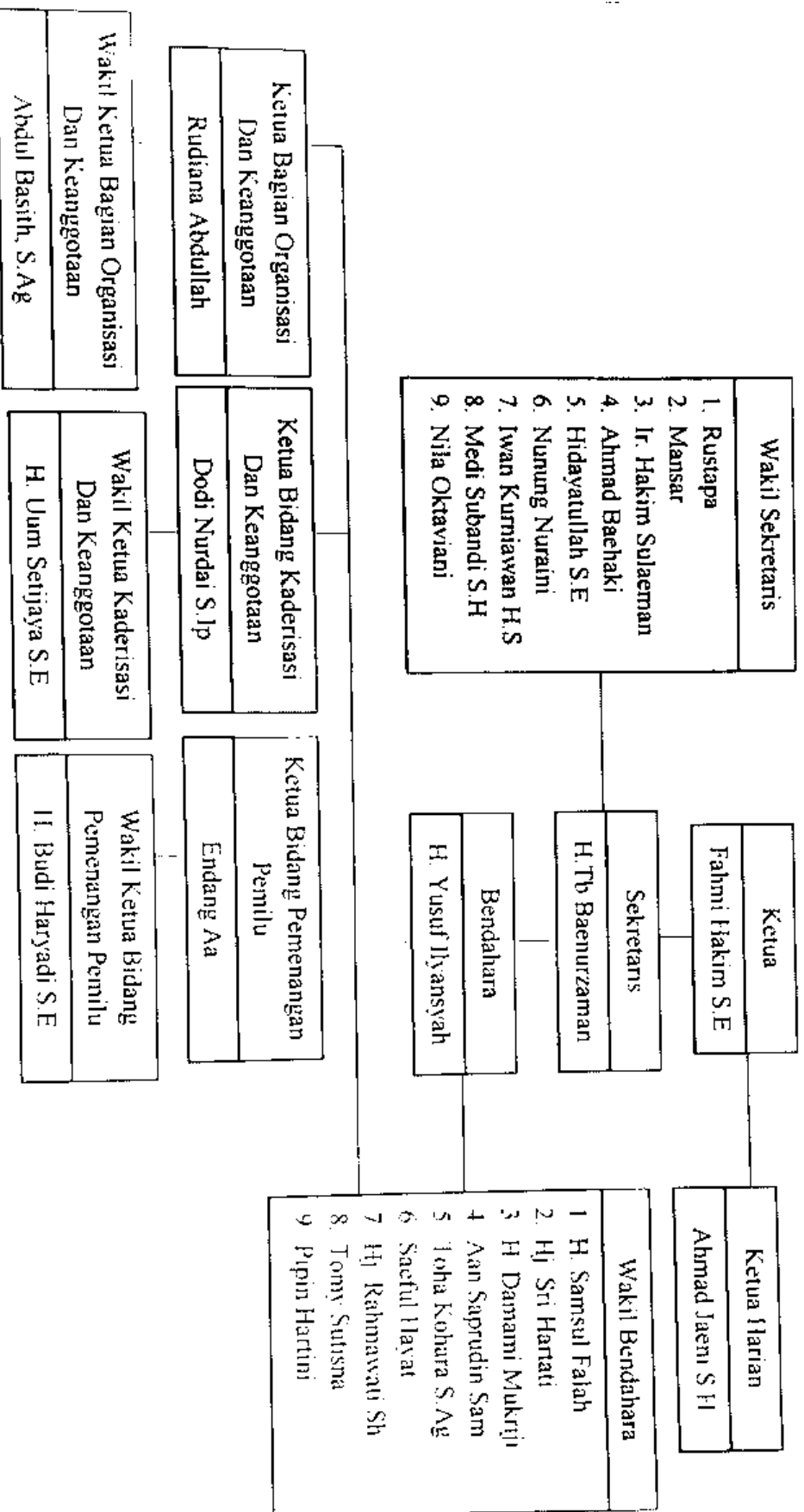
Dalam Penjelasan AD/ART Golkar tentang struktural organisasi kepemimpinan Golkar yaitu :

- 1) Perkumpulan di tingkat masyarakat dimotori oleh Ketua Umum Partai Golkar yang selanjutnya disingkat DPP Golkar
- 1) Organisasi tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pimpinan Daerah Partai golongan karya, selanjutnya disingkat DPD Golkar
- 2) Perkumpulan tingkat bersama dimotori oleh Panitia Jamu Jabatan Fungsional Setempat, yang selanjutnya disingkat DPD Golkar.

3) Perkumpulan di tingkat kecamatan dimotori oleh Pimpinan Badan Pimpinan Cabang Partai Golkar, yang selanjutnya disingkat DPC Golkar.³

³ Ketetapan Munaslub VI Partai Golongan Karya 2016.

**E. Susunan Pengurusan DPP Partai Golkar Kabupaten Serang
Komposisi Dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Serang**



F. Tugas Dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan

Daerah

1. Tugas Pengurus Harian DPD Adalah :
 - a. sebuah. Melakukan pendekatan Golkar di tingkat daerah sesuai anggaran dasar dan peraturan daerah serta pedoman yang diberikan oleh pimpinan sehari-hari DPD Golkar.
 - b. Menetapkan fakultas perseorangan dari musyawarah, perseorangan dari musyawarah, dan perseorangan dari pengurus DPD Golkar dengan sungguh-sungguh atas usul prakarsa musyawarah yang bersangkutan.
 - c. Membentuk dan merencanakan organisasi yayasan.
 - d. Penyusunan LKKD langsung kira-kira 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
2. Wewenang pengurus harian dpd adalah :
 - a. Mengusulkan perubahan personalia pengurus harian DPD kabupaten serang kepada DPD provinsi untuk mendapatkan pengesahan dan melaporkan secara tertulis kepada DPP.
 - b. Menyetujui akibat musyawarah pengurus cabang mengenai pembentukan dan fakultas administrasi sehari-hari DPC dan

wewenang musyawarah DPC, dengan mengumumkan rekaman hard copy kepada DPD Biasa.

- c. Menetapkan organisasi dan kepengurusan Golkar Golkar di DPRD Rezim dengan mempertimbangkan tujuan perseorangan Golongan.
- d. Mengkoordinir rapat-rapat panitia tata usaha cabang yang tidak lazim jika DPD setempat sehari-hari menganggap bahwa telah terjadi kecerobohan dan kepengurusan dalam penyelenggaraan sehari-hari DPC dengan pengesahan administrasi sehari-hari DPD Biasa.
- e. Menjatuhkan, memperbaiki, mengubah pilihan yang diambil Golkar di DPRD Rezim, pemikiran pengurus cabang, administrasi DPC sehari-hari yang bertentangan dengan aturan, rencana pengeluaran keluarga dan peraturan dan pedoman terkait, setelahnya memperhatikan dan memperhatikan Rezim DPD sesuai pilihannya. Lakukan spesialis yang berbeda yang diberikan oleh artikel afiliasi dan peraturan.⁴

⁴Ketetapan Munaslub VI Partai Golongan Karya 2016.

G. Analisis Penulis

Sistem Korespondensi Regulative Up-and-comer yang ideal Baik menurut perspektif teori politik, maupun menurut perspektif hipotesis korespondensi, ada gambaran khas kualitas kerumunan yang optimal. Salah satu kualitas tersebut adalah bahwa orang banyak harus memiliki minat untuk mengikuti perkembangan politik yang terjadi di sekitar mereka (dalam siklus korespondensi, ada kursus memilih orang banyak untuk pertimbangan, pemahaman, dan pemeliharaan. Jadi pertimbangan sangat penting untuk korespondensi terjadi). Ini menyiratkan bahwa kerumunan memiliki akses standar ke data, baik melalui saluran relasional atau melalui komunikasi luas. Karena itu di sana, pertama-tama, harus ada perasaan tertarik atau khawatir tentang apa yang terjadi secara lokal dan negara. Dalam asosiasi ini sangat mungkin diharapkan bahwa, jika individu mengikuti perkembangan masalah legislatif dan pemerintahan, dari perspektif tertentu mereka telah terlibat dengan siklus di mana pilihan politik dari luas tidak sepenuhnya diselesaikan.

Keinginan orang-orang lokal untuk tetap mendapat informasi tentang perbaikan adalah tingkat kontribusi yang dapat diabaikan. Budaya kewarganegaraan mencakup rasa tanggung jawab untuk ikut serta dalam latihan info politik, serta perasaan mampu untuk ambil bagian. Kesiapan untuk mengikuti perbaikan politik dan administrasi merupakan tanggung jawab warga dari sudut pandang terbatas. Namun, tanpa itu, budaya kewarganegaraan negara-negara yang disebutkan di atas tidak akan ada. Dengan cara ini minat dan keinginan untuk mengikuti perbaikan keadaan harus terlihat sebagai kesan bagian mental dari arah kewarganegaraan negara.

Dapat dibenarkan mengapa cita-cita gotong royong masih nyaris tidak terlacak dalam tatanan sosial negara yang muncul. Oleh karena itu, untuk muncul di kerumunan ideal yang diharapkan, prasyarat yang berbeda pada awalnya harus dipenuhi. Di antara unsur-unsur penentu adalah tingkat keberadaan sosial dan keuangan daerah setempat, tingkat pendidikan yang dicapai, beban media, dan jelas keadaan sosial individu itu sendiri sejauh apakah ada lingkungan sosial yang mendorong mereka untuk

melakukannya. tertarik dan mengambil bagian dalam pembangunan perbaikan politik dan administrasi. Selain itu, dalam kaitannya dengan keterampilan aturan mayoritas individu dari daerah yang terkait erat dengan memiliki data yang sah tentang isu-isu dan siklus yang didorong oleh kebijakan.

Setelah memiliki data, warga juga harus memiliki pilihan untuk melibatkan data yang dirujuk untuk memeriksa masalah yang mereka hadapi dan mengembangkan prosedur untuk dampaknya dalam siklus politik yang berkelanjutan. atau disebut rumah ke rumah. Rumah ke rumah kali ini dinilai lebih berhasil melakukan pendekatan langsung dengan wilayah setempat, karena hal ini menuntut pihak resmi yang melakukan kontak langsung (rumah ke rumah) dengan wilayah setempat untuk meminta permohonan dan dukungan dari masyarakat. meliputi daerah setempat, sehingga daerah setempat kemudian menilainya secara lugas. dengan karakter pelamar regulatif yang datang langsung kepadanya. Hal ini tentu berbeda dengan balapan-balapan sebelumnya di mana para pejabat tinggi sebagian besar melengkapi teknik politik mereka dengan memanfaatkan latihan

sosial melalui kelompok pemenang untuk memberikan kebutuhan pokok dan lain-lain kepada daerah.

Konsekuensi dari persepsi analisis dibangun oleh efek samping dari pertemuan dengan sumber pesaing regulatif yang dikutip dalam pertemuan yang menyertainya:

Penulis mengutip Teknik Korespondensi Politik dari partai Golkar regulatif up-and-comer, tepatnya Pak Ajiji S.pd dengan memanfaatkan sistem korespondensi politik rumah ke rumah selama jangka waktu misi dan menyampaikan beberapa poin dan tujuan ke daerah setempat dalam hal bantuan pemerintah daerah dan berjanji untuk mengatasi masalah daerah seperti pembangunan rumah yang tidak layak. residensi (RTLH), mengatasi tingkat pengangguran, memanfaatkan individu yang perlu bekerja di lini produksi dengan membantu berbagai organisasi terkait, dan akan sepenuhnya fokus pada kepentingan daerah di atas kepentingan karakter mereka.⁵

Kemudian Bapak Ajiji Spd juga merupakan salah satu kepala daerah Serang, kecamatan Ciomas yang memiliki karakter

⁵Wawancara Dengan *Narasumber* Bapak Ajiji S.Pd

sosial yang tidak disukai yang sangat dekat dengan daerah sekitarnya, khususnya kelompok masyarakat Ciomas, demikian juga wilayah Serang. daerah di kota-kota yang berbeda di seluruh wilayah Ciomas khusus memohon kepada Tuhan untuk dan sepenuhnya mendukung kehadiran Bapak Ajiji S. .pd yang mencalonkan diri sebagai pesaing regulatif di Peraturan Serang di Dapil IV.⁶

Pencipta mengutip kata-kata Pak Ajiji S.pd untuk mendapatkan dukungan dari daerah, kita harus menggunakan teknik korespondensi rumah ke rumah langsung dengan membujuk beberapa tentang mimpi dan misi kita ke daerah, sehingga daerah menilai dan memilih regulatif. -dan-pendatang yang datang langsung kepadanya, daripada menyelesaikan perkumpulan latihan yang tidak bersentuhan langsung dengan daerah setempat, dengan cara ini orang tidak membutuhkan jaminan seperti yang datang langsung kepada mereka, namun ketika mereka menang dan dipilih sebagai individu dari dewan mereka diabaikan.

⁶ Wawancara Dengan Masyarakat Kp. Kadu Beruk Desa Sukarena Kec. Ciomas

Ini penting bagi saya untuk introspeksi kesimpulan dari publik sehingga suatu saat nanti saya terpilih sebagai individu dari badan pembuat undang-undang, saya tidak akan menipu daerah dan akan fokus pada kepentingan daerah sosial lokal atas kepentingan karakter. Kata Pak Ajiji S.pd.⁷

Kemudian penjelasan dari sumber pendatang baru di atas mengatakan bahwa tata cara surat menyurat dengan segera untuk berhubungan dengan daerah setempat melalui melengkapi teknik surat menyurat dari rumah ke rumah sangat penting bagi pesaing otoritatif di Rezim Serang, khususnya saya oleh dan oleh , mengingat daerah setempat untuk situasi ini membutuhkan figur pemohon resmi yang dapat dihubungi secara langsung (rumah ke rumah). kepada publik sehingga mereka mengetahuinya dan mengetahui sebagian dari poin dan tujuannya.

⁷Wawancara dengan *narasumber* bapak ajiji S.pd

H. Hambatan Dan Progres Perolehan Suara Partai Golkar Pemilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Serang

a. Hambatan Perolehan Suara Partai Golkar di kabupaten Serang

Pengamanan suara Golkar di Pemkab Serang berasal dari pihak dalam dan luar. Golkar memiliki masalah, salah satunya adalah sebagai berbagai arisan moneter dan Pendatang Berwibawa. 2019, mengingat untuk wilayah Serang karena semakin sedikitnya jumlah caleg pada Pilkada April mendatang. Keunikan 'Lempak Lompat' legislator yang dulunya berada di bawah bendera Golkar ini cukup banyak mempengaruhi perolehan suara partai nanti.

Demikian pula, peristiwa politik yang terjadi sebelum Pilpres 2019 bisa menjadi penghalang bagi Partai Golkar karena memiliki opsi untuk membingkai penilaian populer yang negatif juga, dan ini jelas akan menurunkan tingkat belas kasihan dan kecenderungan untuk memutuskan yang menguntungkan daerah terhadap Golkar. Ini juga sangat ditekankan karena bisa mempengaruhi kuantitas suara Golkar.

Penulis Mengutip Beberapa Hambatan Perolehan Suara Partai Golkar terkait dengan agenda-agenda Calon Legislatif dalam melakukan kampanye secara langsung diantaranya :

1. Kurangnya Peran Komunikasi Calon Legislatif dalam beretorika dengan masyarakat sekitar.
2. Kurangnya Finansial Partai dan Calon Legislatif dalam melakukan kegiatan.
3. Terlalu menganggap remeh lawan Politiknya dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik didaerah tersebut.
4. Terlalu Menjadikan Partai Golkar sebagai Garda terdepan yang Unggul Dalam setiap Perolehan Suara pada pemilihan legislatif dari Tahun Ketahun.
5. Partai Golkar terlalu menjastifikasi lawan politiknya dalam membentuk Opini yang negatif.

b. Progres Perolehan Suara Partai Golkar di kabupaten Serang

Komisi Perlombaan Politik Umum (KPU) Kabupaten Serang telah menutup rapat umum terbuka untuk merangkum konsekuensi dari keputusan politik umum 2019. Keseluruhan

terbuka, yang awalnya diantisipasi tiga hari, telah ditunda menjadi empat hari. Dalam seluruh rapat itu terungkap perolehan suara Partai Golkar masih dalam perolehan suara yang berbeda, namun dengan Partai Gerindra yang penting hanya 3.104 suara.

Adapun perolehan suara Partai Golkar di Kabupaten Serang pada pemilu 2019 ini sebanyak 137.393 suara, naik dari tahun 2014 yaitu sebesar 133.609 suara. Untuk perolehan suara Partai Gerindra pada pemilu 2019 ini sebesar 134.289 suara, naik dari tahun 2014 sebesar 92.063 suara. Kemudian perolehan suara posisi ketiga diraih PKS sebesar 86.194 suara, naik dari tahun 2014, yaitu sebesar 64.578 suara.

Selanjutnya, untuk posisi keempat pada pemilu 2019 ini yaitu Partai Demokrat yang memperoleh suara sebesar 67.957, naik dari tahun 2014 yaitu, sebesar 52.007 suara. Sedangkan untuk suara PDI Perjuangan mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 75.300 suara, pada pemilu 2019 ini memperoleh suara sebesar 59.769. Kemudian perolehan suara yang mengalami penurunan signifikan yaitu, PPP dari 82.315 suara pada 2014 menjadi 50.705 suara pada 2019.

“Alhamdulillah untuk pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat Kabupaten Serang bisa berjalan dengan aman, lancar dan damai. Semua pihak, baik itu saksi partai politik, saksi DPD (Dewan Perwakilan Daerah), maupun saksi calon presiden dan wakil presiden bisa menjaga kondusivitas,” kata Abidin Nasyar, Ketua KPU Kabupaten Serang, di Hotel Flamengo, Sabtu malam (4/5)⁸.

Menurut salah satu kader partai politik Golkar bapak aji S.pd.i Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia pada pemilihan umum Pileg kabupaten serang 2019 Golkar Menduduki Peringkat Pertama dengan perolehan suara terbesar di berbagai partai politik lainnya dikabupaten serang. Oleh karenanya Golkar masih tetap bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun kabupaten serang yang lebih baik⁹.

Penulis Mengutip Beberapa Progres Perolehan Suara Partai Golkar dimasing-masing Dapil diantaranya:

⁸Wawancara Narasumber Ketua KPU Kab. Serang, Abidin Nasyar.

⁹Wawancara Narasumber Pengurus DPD Golkar Kab. Serang, aji S.pd.i

1. Untuk Partai Golkar Perolehan Suara Tertinggi di Dapil 1 Serang Utara sangat membantu dalam pengangkatan suara partai Golkar di Kabupaten Serang sehingga mengakibatkan selisih yang sangat jauh dari partai politik yang lainnya.
2. Untuk partai Golkar Perolehan Suara Dapil II Serang Timur Dan Dapil III serang selatan memperoleh peringkat kedua dari masing-masing partai politik lainnya sehingga untuk pengangkatan suara didaerah tersebut lebih didominasi partai gerindra, maka partai golkar sendiri masuk dikategori peringkat suara kedua didaerah tersebut.
3. Untuk partai golkar perolehan suara dapil IV dan V serang barat memperoleh suara tertinggi dengan peringkat pertama diberbagai partai politik yang lainnya, sehingga partai golkar sendiri untuk didaerah serang barat masih mendominasi perolehan suara disetiap pemilihan legislatif dikabupaten serang.